**Tupoksi Guru, Konselor, dan Psikiater**

 **dalam Pendidikan Formal**

**Wildan Halid,. Syamsul Hadi,. Heri Padli**

**willdanhalid@gmail.com****,.rakhaaazzikry@gmail.com,** **herinet1.lombok@gmail.com****,.**

**Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Lombok Barat**

**Abstrak**

*Kata Kunci: Pendidikan formal, Konselor, Guru dan Psikiatri*

*Pendidikan formal adalah sebuah lembaga pendidikkan yang menggunakan kurikulum yang baka yang di atur undang-undan dan semua turunannnya namun dari tahun ke tahun selalu ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta adanya tuntutan kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks baik perubahan mata pelajaran, perubahan struktural dan manajemen serta adanya penambahan di luar guru mata pelajaran seperti Konselor dan psikiatri, ini menunjukkan terjadinya perubahan atau perkembangan di dasarkan pada kebutuhan yang mendesak atau urgen sehingga lembaga pendidikan formal khususnya secara bertahap terus melakukan pembenahan di lingkungan internanya. Berangkat dari perubahan-perubahan inilah dalam pendidikan formal selalu terjadi hal-hal ambigu terkait penempatan-penempatan sumber daya manusianya sesuai tupoksinya, seperti halnya Konselor, Guru dan Psikiatri. Yang masih sering menjadi bahan perdebatan atau diskusi adalah seorang Konselor seperti apa, bagaimana peran, tugas dan fungsinya, berbeda dengan Guru dan Psikiatri arahnya sudah jelas kemana arahnya. Karena itulah dalam tulisan ini tidak terlalu di bahas secara panjang lebar, berbeda halnya dengan Konselor atau yang sering di sebut Guru BK dalam pendidikan formal dalam uraian-uraian tulisan ini akan di bahas secara maksimal mulai dari proses awal hingga akhir mendapatkan gelar sarjana bimbingan dan konseling hingga di anugerahi sertifikat Konselor yang di disingkat “Kons”.*

**PENDAHULUAN**

Memperhatikan perkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan formal masih banyak masalah khususnya masalah siswa mulai dari kenakalan, yang disebabkan berbagai faktor dan juga siswa yang murung sampai dengan siswa yang berprestasi semua punya potensi masalah, sehingga di butuhkan peran konselor, guru dan psikiatri dalam pendidikan formal untuk memerankan masing –masing tufoksinya secara profesional sehingga tidak tumpang tindih atau tidak terjadi mal-tufoksi sehingga dalam mengambil peran semua menjadi terarah dan jelas dan dengan sendirinya kwalitas akan terlihat secara otomatis

Berangkat dari masalah ini penulis merasa urgen untuk menguraikan secara lugas melalui artikel atau tulisan ini tugas pokok dan fungsi konselor, guru dan psikiatri dalam pendidikan formal karena melihat perjalanan dari peran tiga disiplin ilmu ini yang masih banyak tidak dipahami khalayak secara umum adalah peran dari seorang konselor pada pendidikan formal, publik masih ambigu dalam melihat peran konselor di karenakan mungkin penyebutan pada pendidikan formal seringnya disebut guru BK sehingga soelah olah seorang konselor di anggap guru mata pelajaran bahkan di jadikan guru mata pelajaran di banyak sekolah atau di pendidikan formal.

Berangkat dari pemahaman kebanyakan khalayak yang masih keliru dalam mempersepsikan konselor atau jamak kita dengar dengan sebutan guru BK,dalam bahasan tulisan ini yang akan lebih banyak di kupas adalah disiplin ilmu bimbingan dan konseling yang mana kalau guru dan psikiatri hanya akan dibahas secara simpel dan gamblang karena berdasarkan keyakinan penulis khalayak telah memahami arah keilmuan yang dua ini kecuali ilmu bimbingan dan konseling, akan di bahas secara tuntas tugas, peran dan fungsinya pada pendidikan formal sampai bagaimana proses dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar anugerah strata satu bimbingan dan konseling dan mendapatkan sertifikat gelar konselor.

Sehingga penulis berharap siapapun yang membaca tulisan atau artikel ini, akan ada sumbangsih pencerahan bagi khalayak khususnya mahasiswa/i yang menempuh atau mengambil jurusan bimbingan dan konseling memahami bahwa jurusan yang di ambil adalah jurusan yang sangat mulia yang nilai sosialnya begitu besar karena kebermanfataan dari ilmu itu sendiri.

**TELAAH YURIDIS**

**S**ecara Yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (6) undang-undang nomer 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Akan tetapi dalam pasal-pasal berikutnya, pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara kualifikasi tenaga pendidik satu dengan lainnya, tidak dilanjutkan dengan spesifikasi konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang lebih cermat, karena yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya hanyalah konteks tugas dan ekspektasi kinerja dari mayoritas pendidik yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.[[1]](#footnote-2)

Denga spesifikasi konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang hanya merujuk kelompok pendidik yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan. Maka konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan sehingga merupakan sosok layanan ahli yang unik, yang berbeda dari sosok layanan ahli keguruan meskipun sama-sama bertugas dalam setting pendidikan, tidak ditemukan pengaturan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah disebutkan.

Keberadaan konselor memang disebut kembali pada penjelasan pasal 28 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, akan tetapi sebagai mana halnya dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang standar pendidikan nasional, juga tidak ditemukan pengaturan standar kompetensi yang khas yang dapat diberlakukan bagi konselor. Sementara itu dalam undang-undang nomor 14/2005 tentang guru dan dosen juga tidak ditemukan pasal dan ayat yang menyangkut keberadaan konselor. Dengan kata lain, di dalam semua ketentuan perundangan dan peraturan yang disebutkan,tidak terdapat pasal dan ayat yang menyangkut dan/atau menjelaskan keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional.[[2]](#footnote-3)

Peraturan menteri pendidikan nasional noor 22/2006 tentang standar isi juga dikaji secara khusus karena dalam peraturan menteri yang mengatur isi pendidikan, ditemukan komponen pengembangan diri yang dinyatakan berada diluar kelompok mata pelajaran dan dikaitkan dengan “konseling”, sehingga timbul kesan bahwa konselor adalah juga pendidik yang diamanati menyampaikan materi kurikuler dalam hal ini materi pengembangan diri yang harus dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling serta dipertanggungjawabkan melalui penilaian pada akhir tiap kegiatan penyampaian, sehingga berdampakk menyamakan ekspektasi kinerja konselor, yang secara hakiki tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.

Dengan ekspektasi kinerja guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan. Akibatnya, di lapangan tumbuh persepsi yang mengancam integritas layanan bimbingan dan konseling yang tidak mengggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, karena implementasi panduan pengembangan diri untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang diturunkan dari standar isi, meletakkan pada konselor, tanggung jawab penyampaian materi pengembangan diri pada peserta didik serta melakukan penilaian hasilbimbingan dan konseling yang memuat materi pengembangan diri sebagaimana layaknya hasil pembelajaran yang harus dinilai pada akhir tiap penyampaian materi pembelajaran.[[3]](#footnote-4)

**SETTING LAYANAN**

Langkah awal yang perlu diilakukan untuk menghindarkan kerancuan, maka yang pertama-tama perlu ditegaskan adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor sebagai pendidik yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan adalah setting pendidikan khususnya pada jalur pendidikan formal yang juga mewadahi layanan guru sebagai pendidik, namun yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, perbedaan muatan layanan inilah yang membuat konselor memberikan layanan profesional yang unik sosoknya berbeda secara mendasar, jika dibandingkan dengan guru yang juga memberikan layanan profesional yang unik yang berbeda secara mendasar dari sosok layanan ahli konselor,karena guru menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.[[4]](#footnote-5)

Layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan inilah yang dijadikan fokus dalam tulisan ini,walaupun tidak menutup kemungkinan bisa ditemukan pembahasan kebutuhan akan layanan ahli tersebut dijalur pendidikan non formal. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang setting layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan sebagaimana dijelaskan diatas, akan menghindarkan akan terseretnya konselor ke dalam setting layanan psikolog, psikiater atau pekerja sosial apalagi ke setting ketenagakerjaan dalam dunia industri, kehidupan perkawinan atau keagamaan dan sebagainya.[[5]](#footnote-6)

Para konselor di pendidikan formal sering diminta menyediakan layanan untuk menstimulasikan peluang-peluang pendidikan bagi individu yang lemah dalam pembelajarannya. Tanggung jawab tersebut mencakup bukan hanya aktifitas bimbingan individu dan konseling tradisional tetapi juga program orientasi khusus, kelompok pendukung kursus keahlian dan aktivitas pengembangan karir. Guru dan konselor jalas memiliki peran yang membedakan posisi mereka di lingkup pendidikan formal.[[6]](#footnote-7)

Apabila dicermati lebih jauh, di dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal selain dapat dan perlu dibedakan adanya wilayah layanan pembelajaran yang mendidik yang menjadi wilayah tanggung jawab guru, dari wilayah layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tangggung jawab konselor, juga perlu diakui dan dihormati adanya wilayah layanan manajemen yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang lazimnya dijabat oleh guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah, dan syukurnya dari kalangan konselor sudah mulai ada yang ditugasi sebagai kepala sekolah di beberapa wilayah walaupun termasuk sesuatu yang masih langka namun sudah ada perubahan seiring paradigma pendidikan yang terus mengalami revisi.

Karena pada dasarnya baik guru maupun konselor sama-sama tidak dipersiapkan sebagai kepala sekolah pada tahap pendidikan pra-jabatan. Dengan kata lain, keampuan sebagai kepala sekolah harus dibangun di atas kemampuan serta rekam jejak pengalaman sebagai guru atau sebagai konselor, juga sesuai dengan kriteria serta prosedur penetapan kepala sekolah yang berlaku di tanah air, kemampuan sebagai kepala sekolah tidak dibentuk dalam pendidikan di jenjang strata satu. Dalam pada itu perlu ditambahkan bahwa, pembedaan wilayah layanan di antara guru dan konselor dalam jalur pendidikan formal ini tidak merupakan pemisahan, sebab demi tercapainya misi sekolah dengan sebaik-baiknya, disyaratkan adanya keterhubungan di antara pemangku layanan dalam ketiga wilayah layanan yang telah disebutkan.

Dalam rangka penspesifikasian pelaksanaan profesionalitasnya kapada pengguna layanan itulah, wilayah layanan ahli itu perlu diperinci lebih jauh menjadi konteks layanan. Dalam masyarakat yang sudah lebih maju pendidikannya, dikenal adanya berbagai asosiasi profesi dalam dalam setting pendidikan. Dalam bidang keguruan dikenal adanya asosiasi profesi profesional guru yang masih dipilah-pilah lagi menjadi asosiasi profesional guru matematika dan lain sebagainya hingga asosiasi profesional kepala sekolah dan pengawas mata pelajaran. Di Indonesia, kelompok konselor dan pendidik konselor telah menghimpun diri dalam suatu asosiasi profesi yang mula-mula dinamakan ikatan petugas bimbingan dan konseling dan kemudian berubah nama menjadi asosiasi bimbingan dan konseling

**KONTEKS TUGAS KONSELOR**

Untuk meredefinisikan konteks tugas konselor, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap wacana yang berkembang kurang lebih dalam satu dekade terakhir, yang nampaknya visi dan misi layanan ahli bimbingan dan konseling di tanah air dalam konteks “manusia belajar sepanjang hayat yang membutuhkan berbagai jenis layanan yang juga bercakupan sejagat hayat”. Jika memang demikian adanya, konselor Indonesia nampaknya dipersepsikan mampu menangani nyaris keseluruhan permasalahan hidup yang dihadapi oleh ummat manusia setidak-tidaknya manusia indonesia.[[7]](#footnote-8)

Oleh karena tulah perlu dilakukan redefinisi tehadap *niche* dimana layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu, paling berpeluang bagi konselor profesional untuk menampilkan kinerja yang maksimal. Secara operasional habitat terbaik bagi konselor tersebut dapat digambarkan sebagai wilayah penyelenggaraan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan yang diampu oleh lulusan program strata satu pendidikan profesional konselor pra-jabatan terintegrasi dengan kemampuan akademik lulusan strata satu bimbingan dan konseling ditambah kemampuan profesional yang dibentuk melalui pendidikan profesi konselor berupa program pengalaman lapangan dengan masa studi sekitar du semester yang mutunya tidak ditawar-tawar sehingga menghasilkan konselor profesional yang *safe practitioner*.[[8]](#footnote-9)

Di satu pihak memiliki nilai jual tinggi yang dicari –cari oleh pemakai layanan, akan tetapi dipihak lain, juga menarik untuk “dibeli” oleh sistem pengguna layanan. Habitat terbaik bagi konselor profesional sebagaimana yang digambarkan mencakup “wilayah layanan yang bertujuan memandirikan individu yang normal dan sehat dalam menavigasi perjalanan hidup melalui pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan” .

Frasa pembatas “melalui pendidikan” ini secara sadar di tambahkan karena kemampuan peserta didik untuk mengekplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan karir itu ditumbuhkan secara isi- mengisi atau komplementer oleh konselor dan oleh guru dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal. Dan sebaliknya tidak merupakan hasil upaya yang dilakukan sendirian oleh konselor, atau yang dilakukan oleh guru. Meskipun jika dicermati secara mendalam, penanganan pengembangan diri peserta didik secara utuh dan maksimal itu lebih banyak terkait dengan wilayah layanan guru, yaitu dengan merajutkan pembentukan berbagai dampak pengiring (*nurturant effects*) yang relevan dalam rangka mewujudkan secara utuh sosok pembelajaran yang mendidik yang menggunakan materi kurikuler sebagai konteks kegiatan belajar, namun dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal. Kontribusi guru masih bersifat parsial sehingga perlu dilengkapi oleh konselor yang menyelenggarakan layanannya di wilayah Bimbingan dan Konseling [[9]](#footnote-10)

Komplementaritas antara layanan profesional guru dan layanan profesional konselor inilah yang dibaurkan dalam kurikulum khususnya melalui spesifikasi isi pendidikan sebagaimana yang direfesentasikan, konselor memang diharapkan untuk berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, baik melalui penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan yang dilakukan dalam wilayah layanannya, maupun secara bahu-membahu dengan guru dalam pengelolaan kegiatan ekstra kurikuler dalam setting pendidikan.

Di samping didasarkan pada konteks tugas yang dikaitkan dengan jenjang pendidikan sebagaimana telah dikemukakan, selanjutnya pada tiap jenjang pendidikan tersebut, penggelaran layanan ahli bimbingan dan konseling juga masih perlu disetalakan (*fine tuned*) dengan kebutuhan akan layanan individual tiap konseli yang bersifat ideosinkratik, karena tiap perjumpaan konseling pada dasarnya merupakan perjumpaan budaya pada tataran mikro (*mikro cultural level*), antara budaya individual konseli dengan budaya individual konselor. Dalam kaitan dengan penyetalaan yang bersifat ideosinkratik inilah, konselor perlu mengerahkan secara maksimal penguasaan baik *Cultural-Diversity Competence* maupun *Mind Competence* yang diperolehnya melalui Pendidikan Prefesional Konselor.[[10]](#footnote-11)

**EKSPEKTASI KINERJA KONSELOR**

Peran fungsi dan pelatihan para konselor di berbagai lingkup komunitas dan kelembagaan luar sekolah. Lembaga kesehatan mental komunitas mungkin yang paling siap menghadapi kebutuhan luas perkembangan dan penanganan medis. Staf di lembaga ini juga beragam meliputi ahli medis, psikiater, pekerja sosial dan psikolog, kuhsus dalam pendidikan formal dan lain-lain para konselor di lingkup luar sekolah sangat penting posisinya[[11]](#footnote-12) secara konseptual terapan layanan ahli termasuk layanan ahli bimbingan dan konseling itu selalu merupakan pengejawantahan seni yang berpijak pada landasan akademik yang kokoh. Penggunaan kerangka pikir seni yang berbasis penguasaan akademik yang kokoh atau seni yang berbasis saintifik ini penting digarisbawahi karena dalam penyelenggaraan layanan ahli disetiap bidang perbantuan atau pemfasilitasan (*the helping professions*). Seorang pengampu layanan, tidak terkecuali konselor, selalu berfikir dan bertindak dalam bingkai filosofik yang khas yang dibangunnya sendiri dengan mengintegrasikan apa yang diketahui dari hasil penelitian dan pendapat ahli dalam kawasan keahliannya itu dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya yang bisa sejalan akan tetapi juga bisa tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh masyarakat (pilihan nilai).[[12]](#footnote-13)

Bingkai filosofik ini akan membentuk suatu wawasan yang selalu mewarnai cara seorang konselor melihat dirinya, melihat tugasnya, melihat konseli yang hendak dilayaninya, pendeknya cara seorang konselor melihat dunianya (Corey 2001). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengampu layanan ahli itu seorang konselor selalu mempersandingkan caranya merasa, berpikir dan bertindak karena setiap perjumpaan konseling pada dasarnya merupakan suatu perjumpaan budaya antara budaya konselor dan budaya konseli (Hogan-Garcia 2003,. Smardon 2005,. Wulf,C,.1998). ini berarti bahwa, seorang konselor profesional tidak akan menyarankan kepada konseli yang tengah dilayaninya itu rujukan dan proses penataan diri yang tidak akan anut.

Dalam kaitan ini, sampai dengan batas tertentu, berhubung dengan kesamaannya sebagai penyelenggara layanan ahli di bidang perbantuan atau pemfasilitasian, sebagaimana telah di kemukakan, pembentukan wawasan di bidang layanan ahli keguruan. Penyelenggaraan layanan ahli keguruan juga membutuhkan topangan saintifik yang solid yang digunakan untuk membangun wawasan kependidikan guru (*the scientific basis of the art of teaching* (Gage, 1978, Raka Joni, 1983) yang memayungi ketangkasan mereaksi secarakontekstual (*mind competence,* Nelson-Jones, 2001) yang selalu diejawantahkan dalam unjuk kerja dalam menggelar pembelajaran yang mendidik yang ditampilkan oleh tiap guru yang profesional.[[13]](#footnote-14)

Akan tetapi disamping kesamaannya, juga terdapat cari khas dari tiap tahapan kontekstual tiap bidang layanan ahli tersebut, sehingga meskipun sebagai kemampuan, sosoknya sama yaitu mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan, akan tetapi berbeda dari segi rujukan normatif yang digunakan sehingga bersifat khas untuk tiap konteks layanan ahli. Sebagai perbandingan, karena mengemban misi yang berbeda, kiprah seorang konselor yang melayani konseli normal dan sehat, menggunakan rujukan “layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan ”, sesuai dengan tuntutan relasi diri (*self realization*) konseli melalui fasilitasi perkembangan kapasitasnya sacara maksimal(*capacity development*).

 sedangkan seorang guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks terapan layanannya, menggunakan rujukan normatif “pembelajaran yang mendidik” yang terfokus pada layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan peserta didik dalam proses pembudayaan sepanjang hayat dalam suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dialogis, dan dinamis menuju pencapaian tujuan utuh pendidikan. Sedangkan dibidang psikiatri, meskipun sama-sama mengemban misi penyembuhan, akan tetapi menampilkan rujukan kontekstual yang berbeda dari yang menandai bidang layanan medik.

Maksudnya, dalam bidang psikiatri tidak digunakan paradigma medikal yang mengutamakan hubungan satu lawan satu antara sediaan kemikal yang dinamakan obat dengan penyebab penyakit, atau lebih tepat berbagai kelainan fisiokemikal dalam tubuh pasien yang memicu munculnya gejala yang dinamakan ‘sakit’, melainkan paradigmakontekstual untuk bidang psikoterapi dan deemikian juga untuk bidang bimbingan dan konseling dan bidang keguruan sebagaimana telah diutarakan di atas. Bahkan berhubung dengan ragam gangguan kejiwaan yang diderita pasien, maka untuk gangguan polarisasi citra mental dalam diri pasien yang di tandai oleh konflik antara apa yang disukai dan atau apa yamg dianggap benar yang terkristalisasi sebagai citra mental “aku” dengan citra mental “orang lain”.

Yang mencerminkan segala sesuatu yang tidak disukai dan atau segala sesuatu yang tidak benar sehingga selalu disikapi sebagai musuh dalam dinamika intenal pasienyang membuahkan fragmentasi kalau tidak bahkan disintegrasi diri yang pada gilirannya dapat berdampak sangat mengganggu fungsi sosial-vokasional pasien,. Oleh karena itu, untuk mengatasi polarisasi tersebut sehingga memulihkan kedamaian dalam diri pasien (*inner peace*), digunakan terapi yang mendepolarisasikan citra mental yang menimbulkan konflik dalam diri, yang dinamakan “terapi kedamaian” (susanto,.2006). dalam rangka merespons terhadap reaksi yang bersifat ideosinkratik dari pengguna layanan terhadap tindak layanan yang disodorkan, maka rujukan normatif yang ‘baku’ untuk tiap konteks layanan itupun, masih harus disetalakan dengan sosok dan dinamika psiko-kultural yang unik dari tiap pengguna layanan.

Jhon M. Brewer memandang tugas pendidikan adalah mempersiapkan siswa-siswi memasuki berbagai bidang kehidupan, memetik makna hidup, mendapatkan kepuasan/kebahagiaan hidup. Pendidikan dan bimbingan dianggap tidak jauh berbeda. Keduanya adalah bantuan bagi siswa-siswi untuk berkembang. Pandangan ini berimplikasi pada dua hal di antaranya fokus pelayanan bimbingan adalah pemberian informasi dan konseling. Kedua, ragam bimbingan yang dilakukan berdasarkan pandangan ini adalah bimbingan belajar, pelayanan untuk memelihara kesehatan mental, dan bimbingan pengisian waktu luang, bentuk pelayanan bimbingan seperti pelaksanaan pengajaran dalam bidang studi.[[14]](#footnote-15)

Masyarakat modern banyak memburu keuntungan komersial dan penuh rivalitas banyak mengandung unsur eksplosif mudah pecah dan meledak dalam bentuk tindak kekerasan sebagai akibatnya, banyak penduduk menjadi panik dan sewaktu-waktu bisa meletupkan fenomena penyakit atau gangguan mentalsehingga iklim yang sangat melelahkan jasmani dan rohani manusia membuatnya menjadi sakit. Di tambah pula dengan pengaruh lingkungan dan media masa seperti koran, film,majalah dan iklan-iklan yang meransang, kebudayaan modern cenderung menuntut standar tinggi dan kemewahan. Jika usaha tidak berhasil karena kemampuan untuk mencapainya tidak ada. maka akan muncul rasa takut , bingung, kecwa dan rendah diri.[[15]](#footnote-16)

Sepanjang rentang interaksi pelayanan ahli perbantuan atau pemfasilitasian (bimbingan dan konseling , pembelajaran atau psikoterapi). Dengan kata lain, memang terdapat persamaan yang cukup mendasar antara ketiga konteks layanan terdapat persamaan yang cukup mendasar antara ketiga konteks layanan ahli tersebut, yaitu dipersyaratkannya penguasaan ketangkasan merespons secara kontekstual (*mind competence*) sebagaimana telahdisebutkan, yang digunakan oleh pengampu layanan sebagai asas pengendali (*principles of reaction*) dalam proses pelaksanaan layanan ahli yang bersangkutan. Namun disamping persamaan tersebut, juga terdapat perbedaan yang cukup mendasar diantara ketiga jenis layanan ahli tersebut, sehingga masing-masing jenis layanan ahli tersebut menjanjikan kontribusi yang unik kepada masyarakat.[[16]](#footnote-17)

Bahkan sebagaimana telah dikemukakan, dalam tiap konteks layanan yang unik itupun, juga masih diperlukan penyetalaan antara pendekatan dan teknik layanan yang digunakan dengan kebutuhan individual pengguna layanan pada masing-masing konteks layanan, yang terwujud sebagai layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, layanan pembelajaran yang mendidik dan psikoterapi yang memulihkan. Dengan kata lain, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Telaah Yuridis, terdapat perbedaan yang mendasar dalam pendekatan dan teknik dalam pelaksanaan layanan ahli yang diampu oleh konselor, dengan pendekatan dan teknik dalam pelaksanaan layanan ahli yang diampu oleh guru.

Jelasnya, penyetalaan memang dilakukan secara sepihak pada tahap perancangan yang bertolah dari identifkasi kebutuhan belajar siswa oleh guru’ meskipun harus segera dilakukan penyetalaan sambil jalan secara transaksional dari waktu kewaktu (*on-going adjusments*) sepanjang rentang episode pembelajaran dengan menggunakan “bahasa diskursus kelas yang khas” (*the Language of the Classroom,* Bellack, dkk. 1996), kesemuanya itu demi ketercapaian tujuan utuh pendidikan, sedangkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan psikoterapi, penyetalaan harus dilakukan melalui transaksi makna yang tergelar sepanjang rentang perjumpaan layanan, karena keberhasilan layanan sangat tergantung pada keberhasilan konselor untuk memandirikan konseli berdasarkan “hasil bacaannya” terhadap reaksi ideosentrik konseli terhadap tiap tindak layanan yang dilakukan oleh konselor iti sepanjang rentang proses konseling.

Kebutuhan akan privasi dan indepensi adalah prefensi dan kemampuan para pengaktualisasi diri untuk berfungsi atau bermanfaat secara otonom terhadap lingkungan sosial, karena tidak lagi di dorong oleh motif-motif kekurangan, maka untuk memenuhi perkembangan mereka tergantung pada potensi-potensi dan sumber-sumber dari dalam diri mereka sendiri sehingga memilik kepribadian yang sehat dapat berdiri sendiri dan tingkat otonom yang tinggi membuat mereka mempan terhadap krisis atau kerugian.[[17]](#footnote-18)Dan keberhasilan psikoterapis untuk membangkitkan kemampuan pasien untuk menata atau memulihkan diri, bergantung kepada kecerdasannya “membaca” reaksi pasien yang juga bersifat ideosentrik sepanjang rentang perjumpaan terapi, dengan kata lain penyetalaan sosok layanan selalu dilakukan dalam ketiga jenis layanan ahli tersebut, karena ketiga jenis layanan ahli digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan dalam konteks kemaslahatan umum, sehingga harus dilakukan dengan mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak layanannyaitu terhadap pengguna layanan, bahkan terhadap lingkungan di mana pengguna layanan itu hidup. Oleh karena itu, tiap pengampu layanan ahli itu juga dinamakan “*the reflective practitioner*” (Schone, 1983), sehingga juga layak dikarakterisasikan sebagai “*a safe practitioner*” (Direktorat PPTK-KPT Ditjen Dikti, 2003).

**Sosok Utuh kompetensi Konselor dan Pendidik Konselor[[18]](#footnote-19)**

1. Sosok utuh kompetensi konselor

Sebagaiana di maklumi, usia mahasiswa untuk strata satu umunya sekitar 18-24 tahun, mereka berada pada masa remaja akhir dan dewasa awal, atau berada di antara keduanya, yakni transisi dari masa remaja ke masa dewasa (Hurlock, 1980).[[19]](#footnote-20)Sebagaimana diisyaratkan di atas dan sebagaimana lazimnya dalam profesi lainnya, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas dua komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi akademik konselor profesional

Sebagaimana halnya layanan ahli di bidang lain seperti akuntansi, notariat dan layanan medik, kompetensi akademik konselor yang utuh di peroleh melalui program strata satu pendidikan profesional konselor terintegrasi. Ini berarti, untuk menjadi pengampupelayanan di bidang bimbingan dan konseling, tidak dikenal adanya pendidikan profesional konsekutif sebagaimana yang berlaku di bidang pendidikan profesional guru. Kompetensi akademik seorang konselor profesional terdiri atas kemampuan:

1). Mengenal secara mendalam ‘konseli’(istilah konseli digunakan untuk mencitrakan penerima layanan yang normal dan sehat, bukan penerima layanan yang sedang menghadapi permasalahan yang menjurus ke arah patologik yang merupakan kawasan garapan psikiater atau menyandang kelainan yang merupakan kawasan garapan terapis untuk berbagai bidang yang bersifat khas dalam pendidikan luar biasa)yang hendak dilayani. Sosok kepribadian serta dunnia konseli yang perlu didalami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai intelgensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar kesegenap spektrum kemampuan intelektual manusia sebagaimana di paparkan dalam gagasan intelgensi multipel (Gardner,1993). Selain juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan keampuan berpikir praktikal di samping kemampuan berpikir analitik yang telah dikenal luas selama ini (Stemberg,2003)., motivasi dan keuletannya dalam belajar dan atau bekerja (*perseverance, Marzano, 1992*) yang diharapkan akan menerus sebagai keuletan dalam bekerja, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (a.l. Stamberg,2003) serta kepemimpinan, yang dibingkai dengan kerangka pikir yang memperhadapkan karakteristik konseli yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu sebagai rujukan normatif beserta berbagai permasalahan serta solusi yang harus dipilihnya, dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian (*developmental trajectory*) konseli dari keadaannya sekarang ke arah yang dikehendaki. Selain itu, sesuai dengan panggilan hidupnya sebagai pekerja di bidang profesi perbantuanatau pemfasilitasian (*he;ping professions*), dalam upayanya mengenal secara mendalam konseli yang dilayaninya, konselor selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan keaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya.

2). Menguasai khasanah teortik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling (Van Zandt.Z dan J. Hayslip,2001) mencakup kemampuan:

a). Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling.

b). Mengemas teori, prinsip dan prosedur serta sarana bimbingan dan konseling sebagai pendekatan, prinsip, teknik dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan.

3). Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan (Gisbers, N.C. dan P. Henderson, 2006) seorang konselor harus mampu :

a). Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling

b). Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling

c). Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (*mid-course adjusments*) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli(*mind competence*).

4). Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanannya, konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlansung secara siklikal (*Cyclical Experiental Learning Model,* Kolb, 1984) sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling (*reflective practitioner* , Schone, 1983). Selain itu, upaya peningkatan diri dapat dilakukan secara lebih sisteatis dengan melakukan penelitian tindakan (*Action Research*), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang tersedia didunia maya, selain melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara spontan-informal maupun yang diacarakan secara lebih formal, sampai dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut.

Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan diatas dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikuler yang mencakup kajian tentang pedagogi, psikologi perkembangan, psikologi belajar, bimbingan dan konseling serta beberapa bidang penunjang seperti filsafat pendidikan, sosiologi, antropologi budaya, dinamika kelompok, budaya organisasi kelas dan sekolah, di samping kajian tentang program pendidikan dalamsistem pendidikan formal, strategi bimbingan dan konseling serta strategi pembelajaran, asesmen bakat dan minat konseli disamping asesmen proses dan hasil pembelajaran, dinamika kelompok, pengelolaan kelas dan sebagainya, dengan beban studi minimum 144 SKS.

Terdapat berbagai macam model evaluasi dalam dunia pendidikan. Setiap model evaluasi memiliki karakteristiknya masing-masing berkenaan dengan konsep dasar, metode, serta fokus evaluasi. Stufflebcam mencatat pada tahun 1970-an telah ada sekitar lima puluh model evaluasi. Khusus dalam bidang bimbingan dan konseling, model-model evaluasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling adalah *goal attainment* yang dikembangkan, model evaluasi formative dan sumative, model evaluasi responsif, dan model evaluasi CIPP.[[20]](#footnote-21)

Dengan perkembangan berpikir operasional formal, cara berfikir mahasiswa sudah memungkinkan mandiri daripada masa sebelumnya, yang diperlukan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan mengembangkan karir masa depan sesuai dengan potensi, bakat, minatnya. Menurut Wahidin (2004)Pembelajar yang mendapat latihan kecakapan berpikir, skor kemampuan berpikirnya lebih tinggi daripada pembelajar yang tidak mendapat latihan berpikir[[21]](#footnote-22). Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling sebagaimana digambarkan diatas dapat ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa tes pilihan (*multiple choice*) yang sangat efektif untuk melakukan survei kemampuan yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok calon konselor yang berjumlah besar maupun melalui berbagai asesmen individual untuk mengakses kemampuan dan minat serta permasalahan yang dihadapi oleh calon konselor perorangan. Demi transparansi, sarana uji kompetensi akademik ini dapat dikembangkan secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan teknologi yang relevan dibidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik mengasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon konselor, dianugerahi ijazah strata satu bimbingan dan konseling. Ijazah strata satu bimbingan dan konseling ini merupakan pra-syarat untuk diperkenankan mengikuti pendidikan profesi konselor berupa program pengalaman lapangan selama dua semester.

1. **Kompetensi Profesional Konselor[[22]](#footnote-23)**

Penguasaan Kompetensi Profesional Konselorterbentuk melalui latihan dalam menerapkan Kompetensi akademik dalam bidang akademik dan konseling yang telah dikuasai dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang relevan melalui Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*), yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui tugas terstruktur (*self-managed practice*) sampai dengan latihan mandiri (self-initiated practice) dalam program pemagangan, kesemuanya dibawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong, sesuai dengan misinya untuk menumbuhkan kemampuan profesional konselor, maka kriteria utama keberhasilan dalam keterlibatan mahasiswa dalam Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon konselor dalam menggunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil(*minute if-then decisions* atau *tacit knowledge*) yang dibingkai kaerifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan dampak layanannya demi ketercapaian kemandirian konseli dalam konteks tujuan utuh pendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan kemampuan mahasiswa calon konselor sebagaimana di uraikan diatas, mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang berdampak menumbhkan sosok utuh profesional konselor sebagai praktisi yang aman buat konseli. Namundipihak lain meskipun tergambarkan dengan sangat indah secara teoritik, juga perlu diakui kelemahan-kelemahan implementasinya selama ini, dan bertolak dari kenyataan itu, perlu di upayakan pengatasannya di masa yang akan datang, sehingga amanat penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan konselor yang berujung kepada penganugerahan Sertifikat Konselor itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini juga berarti bahwa penyelenggaran Program Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan itu memerlukan perhatian lebih dari yang diberikan di waktu yang lalu. Selain itu, juga sangat diperlukan dukungan dari pihak pengelola sekolah dan arena praktik lapangan lainnya. Sebab berbeda dari pendidikan medik yang di dukung penuh oleh rumah sakit setempat, pelaksanaan PPl LPTK umumnya kurang mendapat sambutan dari pihak sekolah, meskipun agaknya kesalahan juga terdapat di pihak LPTK. Akan tetapi yang jelas dengan diberlakukannya kebijakan Sertifikasi Konselor, maka tanggung jawab juga seyogyanya secara proposional dipikul oleh pihak sekolah dan arena praktek lapangan lainnya. Sebab peluang keberhasilan konselor yang handal akan tertutup tanpa kerja sama baik di antara LPTK dengan sekolah dan arena praktek lapangan lainnyasebagai dua pihak yang paling berkepentingan (*stakeholders*), karena sebagaimana halnya pendidikan medik yang tidak mungkin menghasilkan dokter yang handal apabila rumah sakit menolak memberikan kerjasama penuh dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter, juga tidak mungkin dihasilkan konselor handal tanpa dukungan pihak pengelola sekolah dan arena praktek lapangan lainnya. Dengan kata lain simbiosis-mutualistis sebagaimana yang terdapat dalam bidang medik itulah yang perlu ditumbuhkan dalam rangka pendidikan profesional konselor ditanah air.

Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor. Berbeda dari tagiahan penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional hanya dapat diverifikasi melalui pengamatan ahli yang, dalam pelaksanaannya, juga sering mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgaar untuk memberikan ruang gerak bagi diabilnya pertimbangan ahli secara lansung (*on-the-spot expert judgment*) misalnya sarana asesmen yang menyerupai alat penilaian kemampuan Guru (APKG) yang merupakan *high-inference assesment instrument,* yang telah beredar di lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-an. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan sarana asesen yang serupa di bidang bibingan dan konseling.

Yang juga perlu dicatat sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asesmen kemampuan profesional konselor itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat (*snapshot* atau *moment opname*), melainkan harus melalui pengamatan berulang, karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional itu bukan hanya difokskan kepada sisi tingkatan kemampuan (*maximum behavior*) melainkan, dan terlebih penting lagi, adalah kualitas keseharian (*typical behavior*) kinerja konselor. Ini berarti bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional itu perlu lebih mengedepankan rekam jejak (*track record*) dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurun waktu tertentu.

Demi transparansi asesmen penguasaan kompetensi profesional calon konselor itu dilakukan dengan menggunakan penguji luar baik dosen bimbingan dan konseling yang berasal dari LPTK lain maupun konselor pamong yang berasal dari sekolah lain. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional konselor melalui program pendidikan profesional konselor yang berupa progra pengalaman lapangan sebagaimana dalam bagian ini, di anugerahi Sertifikat Konselor dan berhak mencantumkan singkatan gelar “Kons” dibelakang namanya.

1. **Sosok Utuh Kompetensi Profesional Pendidik Konselor[[23]](#footnote-24)**

**S**ama halnya dengan konselor, sosok utuh kompetensi profesional pendidik konselor terdiri atas dua komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

1. Kopetensi akademik Penddik Konselor profesional

Merupakan landasan akadeik bagi terapan profesional dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesional bibingan dan konseling, maka kompetensi akademik seorang pendidik konselor terdiri atas kemampuan.

1). Mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani. Pengenalan peserta didik secara mendalam dilakukandengan bertolak dari konsep pedagogik yang bersifat multireferensial, yang meliputi sudut pandang antropologi budaya, psikologi, sosiologi, dan filsafat. Pemahaman tersebut menunjuk kepada keutuhan individu yang unik serta persfektif kemanusiaan sebagai makhluk sosial dan individu. Oleh karena itu, sosok peserta didik yang dikenali itu bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai intelgensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerik matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepanka kemampuan berfikir analitik, melainkan seyogyanya melebar kesegenap spektrum kemampuan intelek manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan intelgensi multipel. motivasi dan keuletan, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan, yang dibingkai dengan kerangka berfikir yang menghadapkan karakteristik peserta didik yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu dengan rujukan normatif dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian peserta didik dari keadaannya sekarang ke arah yang di kehendaki.

2). Menguasai khasanah teoritik bimbingan dan konseling. Penguasaan khasanah theoritik bimbingan dan konseling mencakup kemampuan;

a). Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling

b). Mengemas teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayananbimbingan dan konseling tersebut sebagai materi pembelajaran.

3). Menyelenggarakan pembelajaran bimbingan dan konseling yang mendidik. Dengan menggunakan khasanah teoritik, prosedur dan teknik pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan sebagai konteks, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik itu terdiri atas sub kemampuan (i) merancang program pembelajaran yang memfasilitasi penubuhan karakter serta *soft skills,* disamping pembentukan penguasaan *hard skills,* kesemuanya termasuk yang kkhas diperlukann untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan baik yang berbentuk sebagai dampak lansung dari tindakan pembelajaran (*instructional effects*) maupun sebagai dampak tidak lansung atau dampak pengiring (*nurturant effects*) dari akumulasi pengalaman belajar yang dihayati oleh peserta didik sepanjang rentang proses pembelajaran, kesemuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan situasional. (ii) mengimplementasikan program pembelajaran dengan kewaspadaan penuh (*informed responsiveness*) terhadap peluang untuk menjadikan optimasi antara pemanfaatan dampak instruksional dan dampak pengiring pembelajaran yang di bingkai dengan wawasan kependidikan sebagai asas pengendali. Keseuanya itu sebagaimana telah diisyaratkan, demi ketercapaian tujuan utuh pendidikan s-2 bimbingan dan konseling, (iii) mengakses proses dan hasil pembelajaran yang tercapai baik sebagai dampak lansung maupun muapun dampak pengiring proses pembelajaran dalam konteks tujuan utuh pendidikan S-2 bimbingan dan konseling dan (iv) memanfaatkan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan, baik melalui tindakan remedial maupun pengayaan.

4). Meelihara mutu kinerja program S-! bimbingan konseling. Pemeliharaan mutu kinerja Program S-1 bimbingan dan konseling mengindikasikan dengan jelas, bahwa berbeda dari program S\_1 bimbingan dan konseling yang hanya menuntut kinerja individual lulusannya sebagai konselor dalam jalur pendidikan formal, program S-2 bimbingan dan konseling menuntut lulusannya untuk mampu membina kinerja organisasi yaitu mutu kinerja program S-1 bimbingan dan konseling yang di ampunya melalui (a) penyelenggaraan pendidikan akademik S-1 bimbingan dan konseling, (b) penyelenggaraan pendidikan profesi konselor (c) melalui kerja kesejawatan dengan para koleganya sesama dosen program S-1 bimbingan dan konseling yang di ampunya itu, juga sekaligus mampu secara berkelanjutan memelihara mutu kinerja program S-1 bimbingan dan konseling yang di ampunya itu agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing minimal di tingkat nasional secara khusus, pemeliharaan mutu kinerja program S-1 bimbingan dan konseling itu di lakukan dengan pembentukan penguasaan kemampuan untuk melakukan :

a). Penilaian efisiensi internal dan efisiensi eksternal dalam penyelenggaraan program S-1 bimbingan dan konseling menuju daya saing lulusan minimum di tingkkat nasional melalui evaluasi diri yang digunakan untuk menemukenali akar permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kinerja program S-1 bimbingan dan konseling yang bermutu, serta merancang dan mengimplementasikan program perbaikan bertolak dari akar permasalahan yang diungkapkan.

b). Mensupervisi penyeelenggaraan pendidikan profesional konselor berupa program pengalaman lapangan yang, selain di fokuskan kepada penumbuhan kiat merespons yang memandirikan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling , juga sekaligus dimanfaatkan untuk menyemaikan kemampuan dan kebiasaan untuk menjadi reflective practitioner dengan alur pikir pembelajaran orang dewasa (adult working learners)

c). Memecahkan permasalahan bimbingan dan konseling di lapangan yang merupakan arena pengabdian lulusan program S-1 bimbingan dan konseling melalui penelitian dan pengembangan

d). Menerapkan hasil penilaian, penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan sebagai pekerja profesional yang mengedepankankemaslahatan peserta didik dalam pelaksanaan layanannya. Pendidik konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalaam rangka peningkatan profesionalitas. Upaya peningkatan diri itudapat dilakukan sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam mengelola pembelajaran. Melalui alur pikir pembelajar dewasa yang memetik pelajaran dari keseharian pelaksanaan tugasnya dengan memanfaatkan model pembelajaran eks-perensial yang berlansung secara siklikal. Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikuler yang mencakup kajian mendalam tentang program bimbingan dan konseling khususnya dalam sistem pendidikan formal sekolah, pendekatan, teori serta teknik dan prsedur pelayanan bimningan dan konseling , asesmen, pengelolaan termasuk supervisi pendidikan profesional konselor yang berupa program pengalaman lapangan dan penilaian program pendidikan profesional konselor pra jabatan, serta beberapa bidang penunjang seperti filsafat pendidikan, sosiologi, antropologi budaya, dinamika kelompok, budaya organisasi kelas dan sekolah, disamping kajian tentang kurikulum sekolah, dan sebagainya, dengan beban studi sekitar 80 SKS yang apabila berhasil dikuasai dengan baik, merupakan dasar penganugerahan ijazah S-2 berupa Magister Pendidikan dengan kekhususan Bimbingan dan Konseling.

Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Pendidik Konselor. Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling sebagaimanadi gambarkan di atas ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa ted pilihan yang sangat aktif untuk melakukan survei kemampuan terhadap kelompok peserta didik yang besar maupun melalui tes esai serta contoh karya seperti rancangan penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (*produck samples*) untuk mengakses kemampuan dalam memecahkan masalah. Demi transparansi, sarana uji kompetensi akademik ini dapat dikembangkan secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan teknologi yang relevan di bidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon pendidik konselor, dianugerahi ijazah Magister Pendidikan dengan kekhususan Bimbingan dan Konseling yang mencerminkan kemampuan akademik yang utuh yang setara dengan ijasah strata dua yang dipersyaratkan bagi dosen untuk program strata satu Bimbingan dan Konseling. Magister Pendidikan dengan kekhususan bidang Bimbingan dan konseling ini merupakan pra-syarat untuk diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi bagi calon Pendidik Konselor sebagaimana Profesi bagi calon Pendidik Konselor sebagaimana di uaraikan dalam bagian b berikut.

1. **Kompetensi Profesional Pendidik Konselor**

Penguasaan Kompetensi Profesional Pendidik Konselor terbentuk melalui latihan penerapan Kompetensi Akademik dalam bidang Bimbingan dan Konseling yang telah dikemukakan itu dalamkonteks otentik di sekolah atau arena latihan lain melalui programPendidikan Profesi PendidikKonselor yang berupa Program Pengalaman Lapanganyang sistematis dan sungguh-sungguh, yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar konseling, latihan terbimbingyang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur, kesemuanya dibawah pengawasan Dosen pembimbing dan atau konselor pamong. Sesuai dengan misinya menumbuhkan kemampuan profesional,maka kriteria utama keberhasilan belajar dalam program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa program Pengalaman Lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon pendidik konselor yang bersangkutan dalam menggunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil yang dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan informasi balikan yang terekam sepanjang rentang proses bimbingan dan konseling, sehingga mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Namun dipihak lain, meskipun tergambarkan dengan sangat indah secara teoritk , juga perlu diakui kelemahan-kelemahan implementasi program pengalaman lapangan calon konselor selama ini, dan bertolak dari kenyataan itu, perlu di upayakan pengatasannya di masa yang akan datang, sehingga amanat penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan profesional pendidik konselor yang berujung kepada penganugerahan Sertifikat Magister Konseling itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini juga berarti bahwa penyelenggaraan program pendidikan prefesi pendidik konselor yang berupa program pengalaman lapangan itu memerlukan perhatian serius di masa yang akan datang, karena juga sangat diperlukan dukungan dari pihak pengelola sekolah dan arena latihan lainnya sebab, berbeda dari pendidikan medik yang didukung penuh oleh rumah sakit setempat, pelaksanaan PPL LPTK umumnya kurang mendapat sambutan dari pihak sekolah, meskipun agaknya kesalahan juga terdapat dipihak LPTK. Akan tetapi yang jelas, dengan diberlakukannya kebijakan Sertifikkat Pendidik Konselor, tanggung jawab juga seyogyanya secara proporsional dipikul oleh pihak sekolah,sebab peluang bagi terhasilkannya pendidik konselor yang handal itu akan terttutup tanpa kerja sama baik di antra LPTK dengan sekolah sebagai dua pihak yang paling berkepentingan karena sebagaimana halnya pendidikan medik yang tidak mungkin terhasilkan dokter yang handal apabila rumah sakit menolak memberikan kerjasama penuh dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter, juga tidak mungkin dihasilkan pendidik konselor yang handal tanpa dukungan pihak pengelola sekolah dan arena lainnya. Dengan kata lain, hubungan yang bersifat simbiosis –mutualistis sebagaimana yang terdapat dalam bidang medik itulah yang juga perlu ditumbuhkan dalam rangka pendidikan profesionalpendidik konselor di tanah air.

Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Pendidik Konselor. Berbeda dari tagiahan penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional termasuk penguasaan kemampuan profesional pendidik konselor hanya dapat ditagih melalui pengamatan ahli yang dalam pelaksanaannya juga sering mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara lansung. misalnya sarana asesmen yang menyerupai alat penilaian kemampuan Guru (APKG) yang merupakan *high-inference assesment instrument,* yang telah beredar di lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-an. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan sarana asesmen yang serupa di bidang bibingan dan konseling.

Yang juga perlu dicatat sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asesmen kemampuan profesional guru itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat (*snapshot* atau *moment opname*), melainkan harus melalui pengamatan berulang, karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional pendidik konselor itu bukan hanya difokuskan kepada sisi tingkatan kemampuan (*maximum behavior*) melainkan, dan terlebih penting lagi, adalah kualitas keseharian (*typical behavior*) kinerja konselor. Ini berarti bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional itu perlu lebih mengedepankan rekam jejak (*track record*) dalam penyelenggaraan pengelolaan layanan pembelajaran kepada mahasiswa S-1 bimbingan dan konseling, dan kinerja dalam supervisi penyelenggaraan program pendidikan profesi konselor dalam kurun waktu tertentu

Di masa yang akan datang perlu dikembangkan asesmen yang bersifat seperti yang menyerupai APKG, yang dapat digunakan untuk memverifikasi penguasaan kompetensi profesional pendidik konselor. Demi transparansi, asesmen penguasaan kompetensi profesional pendidik konselor itu dilakukan dengan menggunakan penguji luar baik Dosen yang bersal dari LPTK lain maupun konselor pamong anggota ABKIN yang berasal dari sekolah lain. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional calon pendidik konselor melalui program pendidikan profesi pendidik konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan sebagamana dipaparkan dalam bagian ini, dianugerahi gelar profesi Magister Konseling dan berhak mencantumkan singkatan gelar profesi “M. Kons” di belakang namanya.

**KESIMPULAN**

**S**ebagaiana telah diuraikan di atas bahwa masing-masing tufoksi sudah begitu jelas namun dengan seringnya ada perubahan kurikulum pendidiikan di pendidikan formal khususnya konselor atau guru BK sering menjadi korban peraturan itu sendiri sehingga memunculkan persepsi yang ambigu terhadap konselor atau yang sering di sebut guru BK kalau kita melihat dari sisi keilmuan terlihat jelas kemana arah masing-masing keilmuan itu sendiri. Tapi adanya ke-tidak sinkro-an dari penganbil kebijakan atau yang menyusun peraturan itu sendiri sehingga kedepan di perlukan semua pemangku duduk bersama dalam membahas kurikulum yang di berlakukan di pendidikan formal khususnya.

Dengan melepas masing-masing ego keilmuan itu sendiri maka secara otomatis akan terjadi integrasi-interkoneksi keilmuan, sehingga mal tufoksi bisa di persempit dalam artian tidak terjadi peng-anak tiri-an pada sebuah keilmuan atau dipandang sebelah mata, karena suatu keniscayaan bahwa disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri, masing –masing butuh penopang disiplin ilmu lain dari setiap disiplin ilmu itu sendiri, berapa presentase ilmu lain bisa masuk atau saling memasuki itu tergantung pada masing-masing disiplin ilmu itu sendrii, karena semua akan ada ukuran atau kadar yang secara otomatis terjadi dengan sendirinya.

Kelemahan yang juga terjadi pada ilmu bimbingan dan konseling adalah begitu ideal di tataran teoritik tapi lemah di tataran implementasi di karenakan adanya suppport yang belum maksimal dari berbaagai pihak terkaittidak seperti ilmu medik atau psikiatri daya dukung dari berbagai pihak terkait begitu maksimal. Karena tanpa dukungan yang maksimal maka untuk konselor atau guru BK yang handal akan sulit tercapai. Khususnya ketika para calon-calon konselor praktek lapangan di lembaga pendidikan formal layaknya ilmu medik ketika praktek di rumah sakit yang di support maksimal.

Harapan ke depan ke masa-masa yang akan datang, seorang konselor menjadi mumpuni dalam teori serta lihai pada praktek, bagaimanapun ilmu bimbingan dan konseling juga bagian dairi ilmu seni dan juga bagian dari ilmu-ilmu yang lain. Mulai dari ilmu psikologi, antropologi budaya, filsafat, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Yang dikombinasikan dalam satu disiplin ilmu yakni ilmu Bimbingan dan Konseling.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.* Jakarta: Departeman Pendidikan Nasional 2008.

Robert L. Gibson. Marianne H.Mitchell. *Bimbingan dan Konseling edisi tujuh terj..cet.1.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 20011.

Fajar Santodi. *Manajemen Bimbingan dan Konseling* . Yogyakarta: Universitas sanata Dharma 2010.

Eti Nurhayati *Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Inovatif* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Aip Badrujaman. *Teori dan AplikasiProgram Bimbingan dan Konseling.* Jakarta: PT. Indeks 2011.

Yustinus Semiun, OFM. *Kesehatan mental 1pandangan umum mengenai penyesuaian diri dankesehatan mental serta teori-teori terkait.* Yogyakarta; Kanisius 2006.

Kartini kartono *Patologi sosial.* jakarta; Raja Grafindo Persada 2011.

1. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*(Jakarta: Departeman Pendidikan Nasional 2008)hlm...10 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid..... [↑](#footnote-ref-3)
3. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*.....11 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid.....22 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid.....23 [↑](#footnote-ref-6)
6. Robert L. Gibson. Marianne H.Mitchell. *Bimbingan dan Konseling edisi tujuh terj..cet.1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 20011)hlm...106 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*...25 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid...27 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*...28 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*...33 [↑](#footnote-ref-11)
11. Robert L. Gibson. Marianne H.Mitchell. *Bimbingan dan Konseling edisi tujuh terj..cet.1*...198 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*(Jakarta: Departeman Pendidikan Nasional 2008)hlm...34 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*...35 [↑](#footnote-ref-14)
14. Fajar Santodi. *Manajemen Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Universitas sanata Dharma 2010)hlm...54 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kartini kartono *Patologi sosial*(jakarta; Raja Grafindo Persada 2011)hlm...274 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal..*...37 [↑](#footnote-ref-17)
17. Yustinus Semiun, OFM. *Kesehatan mental 1pandangan umum mengenai penyesuaian diri dankesehatan mental serta teori-teori terkait.* (Yogyakarta; Kanisius 2006) hlm....359 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*hlm.....42 [↑](#footnote-ref-19)
19. . Eti Nurhayati *Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm...3 [↑](#footnote-ref-20)
20. Aip Badrujaman. *Teori dan AplikasiProgram Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Indeks 2011) hlm.....58 [↑](#footnote-ref-21)
21. . Eti Nurhayati *Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Inovatif.*  hlm...6 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.*hlm...42-45 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sunaryo Kardinata dkk,.*Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal* ....50 [↑](#footnote-ref-24)